

ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN PELAKU UMKM MELALUI PEMBIAYAAN UTSMAN PADA BPRS JAM GADANG

Ria Okta Virda¹⁾, Khadijah Nurani²⁾

riaoktavirda@gmail.com¹⁾, khadijahnurani@uinbukittinggi.ac.id²⁾

^{1),2)} Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan usaha dan pendapatan mereka. Pemerintah Kota Bukittinggi bersama BPRS Jam Gadang meluncurkan program Tabungan Utsman sebagai bentuk pembiayaan syariah tanpa bunga (margin nol rupiah) yang bertujuan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembiayaan Utsman mempengaruhi pendapatan pelaku UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 11 informan dimana 2 karyawan BPRS Jam Gadang dan 9 pelaku UMKM yang menjadi nasabah BPRS Jam Gadang, observasi lapangan, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model evaluasi Logic Model untuk menganalisis input, aktivitas, output, dan outcome dari program pembiayaan Utsman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Utsman berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Hal ini terlihat dari peningkatan omzet penjualan, kemampuan memenuhi kebutuhan usaha dan rumah tangga, serta pertumbuhan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan. Namun demikian, masih ditemukan kendala seperti terbatasnya jumlah pinjaman dan kurangnya pengetahuan manajemen keuangan dari pelaku UMKM. Dengan demikian, pembiayaan Utsman terbukti efektif dalam membantu pelaku UMKM meningkatkan pendapatan, namun perlu penguatan dari sisi pendampingan usaha dan akses modal yang lebih fleksibel.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Pendapatan.

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of access to financing for MSMEs in increasing their businesses and income. The Bukittinggi City Government, together with BPRS Jam Gadang, launched the Utsman Savings program as a form of interest-free sharia financing (zero rupiah margin) aimed at supporting community economic empowerment. This study aims to analyze how Utsman financing affects the income of MSMEs. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews with 11 informants: 2 BPRS Jam Gadang employees and 9 MSMEs who are BPRS Jam Gadang customers, field observations, and documentation. This study used a Logic Model evaluation model to analyze the input, activities, outputs, and outcomes of the Utsman financing program. The results show that Utsman financing has a positive impact on

increasing the income of MSMEs. This is evident from the increase in sales turnover, the ability to meet business and household needs, and income growth before and after receiving financing. However, obstacles are still found such as limited loan amounts and a lack of financial management knowledge among MSMEs. Thus, Utsman financing has proven effective in helping MSMEs increase revenue, but requires strengthening business mentoring and more flexible access to capital.

Keywords: *Sharia Financing, Income.*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa visi utama pemerintah daerah dalam era desentralisasi adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk berinisiatif dan berkembang secara mandiri, sehingga tujuan akhirnya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian daerah. UUD 1945 pun secara eksplisit memberikan legitimasi terhadap tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban dalam mengatur dan menjaga kesejahteraan sosial masyarakat.

Sebagai implementasi dari mandat tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah meluncurkan beragam program strategis guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor, antara lain kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Program-program ini juga dirancang untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Contohnya meliputi bantuan sosial bagi kelompok rentan, program pendidikan gratis atau bersubsidi untuk menjamin akses pendidikan yang merata terutama di jenjang dasar dan menengah serta inisiatif pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan. Seluruh program tersebut bertujuan menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera secara berkelanjutan.

Dalam kerangka pemenuhan kebutuhan ekonomi, kehidupan yang sejahtera merupakan harapan dasar setiap individu, mencakup terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, masyarakat kerap menempuh berbagai strategi, salah satunya dengan mendirikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki kontribusi strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta memperkuat perekonomian lokal. Ketangguhan UMKM terbukti saat krisis moneter 1998, di mana mayoritas perusahaan

besar tumbang, namun sektor UMKM justru mampu bertahan dan bahkan berkembang. Peran vital UMKM dalam pembangunan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional, telah menjadi motor penggerak yang tak tergantikan (Srijani, 2020).

Pada awalnya, UMKM lebih dilihat sebagai instrumen ekonomi pedesaan yang penting untuk menciptakan lapangan kerja (Sedyastuti, 2018). Namun, dalam era globalisasi dewasa ini, peran UMKM berkembang menjadi penopang utama ekonomi nasional. Konsep pemberdayaan UMKM mengacu pada mobilisasi sumber daya untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas rakyat secara mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pemberdayaan UMKM memiliki tiga tujuan utama: membentuk struktur perekonomian nasional yang seimbang dan adil; memperkuat dan menumbuhkan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; serta meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, distribusi pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Namun demikian, UMKM juga menghadapi tantangan besar di tengah arus globalisasi dan persaingan pasar yang semakin ketat. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan melalui inovasi produk, pengembangan teknologi dan SDM, serta perluasan pasar (Husaini et al., 2023). Peningkatan daya saing UMKM tidak hanya penting untuk menjaga eksistensi mereka di pasar domestik, tetapi juga sebagai strategi menghadapi serbuan produk asing yang terus meningkat di pasar nasional. Dalam hal ini, peran modal menjadi sangat penting. Modal usaha dapat bersumber dari lembaga perbankan, dana pribadi, atau kombinasi dari keduanya, bahkan melalui lembaga pembiayaan informal. Perlu dipahami bahwa modal tidak selalu berbentuk uang tunai, melainkan dapat berupa aset atau sumber daya lain yang mampu menghasilkan nilai ekonomi. Semakin besar modal yang dikelola secara produktif, maka semakin besar pula potensi peningkatan pendapatan usaha tersebut (Saleh & Utomo, 2018).

Strategi peningkatan pendapatan UMKM dapat ditempuh melalui beberapa pendekatan, seperti peningkatan kualitas produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, ekspansi usaha melalui pembukaan cabang atau diversifikasi produk, serta pemanfaatan program-program dukungan dari pemerintah. Pemerintah, dalam hal ini, telah menyediakan beragam bentuk dukungan, seperti pelatihan, insentif finansial, serta bantuan teknis sebagai bentuk intervensi untuk mendukung keberlanjutan usaha kecil.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM, Pemerintah Kota Bukittinggi meluncurkan sebuah program inovatif yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal akses terhadap pembiayaan. Program ini diwujudkan melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan produk unggulan bernama *Tabungan Utsman*. Program ini memiliki dasar hukum melalui Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi (D. P. Sari et al., 2023). *Tabungan Utsman* memberikan dua manfaat utama: masyarakat dapat menabung sekaligus memperoleh pembiayaan dengan menggunakan akad syariah, yakni akad *Murabahah*, yang bebas dari unsur riba. Pembayaran cicilan pokok dapat dilakukan secara harian, memberikan fleksibilitas tinggi bagi pelaku UMKM (Abadi et al., 2020).

Dalam Perwako No. 7 Tahun 2022 Pasal 12 dijelaskan bahwa seluruh biaya yang timbul dari pembiayaan melalui *Tabungan Utsman* akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Khususnya untuk pembiayaan UMKM, nasabah hanya diwajibkan membayar harga pokok (*principal*) tanpa biaya tambahan apapun, seperti biaya agunan, margin, ataupun biaya administrasi. Seluruh biaya tersebut akan ditanggung oleh pemerintah, dan jika terdapat kelebihan pembayaran oleh nasabah, maka dana tersebut akan otomatis masuk ke saldo tabungan nasabah.

Program ini telah menjadi salah satu inovasi unggulan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Keberhasilan program *Tabungan Utsman* diakui secara nasional melalui raihan tiga penghargaan dalam ajang TOP BUMD Awards 2023, yaitu: Walikota Bukittinggi Erman Safar menerima penghargaan sebagai Top Pembina BUMD 2023, BPRS Jam Gadang memperoleh predikat TOP BUMD Bintang 5, dan Direktur Utama BPRS Jam Gadang, Feri Irawan, mendapatkan penghargaan TOP CEO BUMD 2023 (Dhani & Illahi, 2023).

Selain itu, aspek kepatuhan syariah juga menjadi perhatian serius. Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS), Gusrizal Gazahar, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2024, pihaknya telah secara intens melakukan pengawasan terhadap operasional BPRS Jam Gadang guna memastikan prinsip *Syariah Compliance* terlaksana secara menyeluruh. DPS secara aktif memberikan nasihat dan arahan kepada manajemen agar senantiasa mematuhi prinsip syariah

dan menjaga tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan kaidah muamalah dalam Islam (Sa'idah, 2017).

Adapun syarat umum untuk menjadi nasabah *Tabungan Utsman* antara lain: berstatus sebagai Warga Negara Indonesia berusia minimal 17 tahun, memiliki identitas resmi seperti KTP atau SIM yang berlaku di wilayah Bukittinggi, melakukan setoran awal minimal Rp 10.000, tidak memiliki riwayat kredit macet di lembaga keuangan lain, menyampaikan rencana penggunaan dana secara jelas, memiliki lokasi usaha di wilayah administrasi Kota Bukittinggi, dan bersedia menandatangani perjanjian pembukaan rekening serta akad pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pelaku UMKM Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024

NO	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Kenaikan	Persentase
1	2020	454 Nasabah	2020 Ke 2021 Naik 104 Nasabah	2020 Ke 2021 Naik 0,22 %
2	2021	558 Nasabah		
3	2022	612 Nasabah	2021 Ke 2022 Naik 54 Nasabah	2021 Ke 2022 Naik 0,09%
4	2023	716 Nasabah	2022 Ke 2023 Naik 100 Nasabah	2022 Ke 2023 Naik 0,16%
5	2024	1020 Nasabah	2023 Ke 2024 Naik 304 Nasabah	2023 Ke 2024 Naik 0,42%

Sumber: BPRS Jam Gadang 2024

Hingga Maret 2024, program *Tabungan Utsman* yang dijalankan oleh BPRS Jam Gadang telah mencatat capaian signifikan dalam hal realisasi pembiayaan. Tercatat lebih dari Rp21 miliar telah disalurkan kepada 2.747 nasabah, dengan dukungan subsidi dana margin sebesar Rp2,5 miliar yang dialokasikan melalui APBD Kota Bukittinggi. Guna memperluas manfaat program ini, Pemerintah Kota juga merencanakan penambahan anggaran sebesar Rp500 juta untuk menjangkau total 3.000 nasabah (Badar, 2023). Inovasi pembiayaan ini menjadikan *Tabungan Utsman* sebagai model percontohan bagi daerah lain karena terbukti mampu membantu menyelamatkan serta mengembangkan UMKM melalui skema pembiayaan yang berbasis syariah. Para pelaku UMKM diberikan akses pembiayaan maksimal hingga Rp10 juta tanpa dikenakan margin, sehingga sangat meringankan beban usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi mikro secara inklusif.

Tabel 1.2
Data Realisasi Pembiayaan terhadap UMKM BPR Syariah Jam Gadang
Tahun 2024

No	Nama	Tahun	Jenis Usaha	Jumlah Pembiayaan	Jenis Pembiayaan
1	Linda	2024	Toko tas	Rp. 15.000.000	Murabahah
2	Mei	2024	Pedagang Makanan	Rp. 10.000.000	Murabahah
3	Mardianis	2024	Mebel	Rp. 20.000.000	Murabahah
4	Widodo	2024	Pedagang Pakaian	Rp. 20.000.000	Murabahah
5	Siti K	2024	Toko Bangunan	Rp. 35.000.000	Murabahah
6	Jefri	2024	Toko Sepatu	Rp. 15.000.000	Murabahah
7	Arlan	2024	Toko Baju	Rp. 20.000.000	Murabahah
8	Betarini	2024	Toko Tekstil	Rp. 15.000.000	Murabahah
9	Masriful	2024	Toko Bangunan	Rp. 35.000.000	Murabahah
10	Wikanasmi	2024	Toko Jam dan Perhiasan	Rp. 10.000.000	Murabahah

Sumber: BPR Syariah Jam Gadang Tahun 2024

Hasil survei awal peneliti pada 25 Desember 2024 bersama staf PT BPRS Jam Gadang dan Dinas UKM Bukittinggi menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM melalui *Tabungan Utsman* menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran dan tenaga kerja, rendahnya literasi bisnis pelaku UMKM, serta terbatasnya akses pasar. Indikator keberhasilan program dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah UMKM, peningkatan kualitas produk, dan tingkat kepuasan pelaku usaha. Wawancara dengan 10 nasabah mengungkapkan bahwa plafon pinjaman yang hanya Rp10 juta dirasa belum cukup untuk ekspansi usaha, mencerminkan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Hingga kini belum ada evaluasi formal terhadap program karena masih tergolong baru. Untuk itu, peneliti menggunakan Model Logika Program (Logic Model) sebagai kerangka evaluasi, yang mencakup input (modal dan subsidi), aktivitas (pemberian dan pelunasan pinjaman), output (pertumbuhan UMKM, peningkatan pendapatan dan lapangan kerja), dan outcome (peningkatan kesejahteraan ekonomi). Evaluasi ini penting untuk menilai efektivitas program dan dasar pengambilan kebijakan lanjutan

KAJIAN PUSTAKA

1. Analisis

Merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk menguraikan, mengkaji, serta memahami suatu objek atau permasalahan tertentu secara mendalam guna memperoleh informasi yang akurat dan relevan (Fitri & Nurani, 2023). Informasi ini kemudian dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, penyusunan laporan ilmiah, maupun pengembangan kebijakan (Marliza & Nurani, 2024). Dalam konteks penelitian ini, objek analisis difokuskan pada efektivitas pembiayaan *Tabungan Utsman* dalam meningkatkan pendapatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bukittinggi (I. Sari, 2020; Suteja, 2018).

2. Pembiayaan Tabungan Utsman

Merujuk pada penyediaan dana oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang kepada pelaku usaha mikro dan pedagang lokal melalui mekanisme kesepakatan syariah, tanpa melibatkan bunga. Mengacu pada pendapat Kasmir, pembiayaan adalah suatu bentuk kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak yang menerima pembiayaan, yang mengharuskan pengembalian dana dalam jangka waktu tertentu. Produk *Tabungan Utsman* didesain khusus sebagai instrumen keuangan inklusif yang bertujuan mendukung permodalan UMKM secara syariah agar mereka dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

3. Meningkatkan

Dalam konteks ini, merujuk pada upaya sistematis dan terencana untuk membawa suatu kondisi ke arah yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Mahmuda & Nurani, 2024). Menurut Annisa & Nurani (2024), peningkatan adalah proses atau tindakan untuk menaikkan atau memajukan sesuatu ke tingkatan yang lebih tinggi. Sementara itu, *pendapatan* didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh dari suatu bentuk kerja atau usaha, yang dalam penelitian ini berkaitan erat dengan pendapatan pelaku UMKM setelah menerima pembiayaan dari program Tabungan Utsman (Fitria et al., 2019; Supriani et al., 2020).

4. UMKM

Merupakan entitas usaha berskala kecil hingga menengah yang mencakup sebagian besar unit usaha di Indonesia (Efendi & Zulvianti, 2025). UMKM didefinisikan sebagai unit usaha produktif yang dikelola secara mandiri oleh individu maupun berbadan hukum, dan bergerak di berbagai sektor ekonomi. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal, UMKM memiliki peran strategis sebagai penyerap tenaga kerja dan pendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Sunarsi, 2020). Sedangkan BPRS Jam Gadang merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang beroperasi tanpa memberikan jasa lalu lintas pembayaran, namun fokus pada pembiayaan usaha dan penyimpanan dana masyarakat dengan prinsip keuangan Islam. Kehadiran BPRS ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyalurkan program-program permodalan seperti Tabungan Utsman, yang tidak hanya bebas riba tetapi juga lebih terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah (Ayodya, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dikenal luas dalam bidang ilmu sosial dan pendidikan karena kemampuannya menggali makna serta memahami fenomena secara mendalam. Metode ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga interpretatif, yang memungkinkan peneliti membangun pengetahuan berdasarkan interaksi langsung dengan subjek penelitian dan konteks sosial yang melingkupinya (Efendi & Mansur, 2023). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi berbagai realitas sosial serta memahami pengalaman manusia secara menyeluruh. Dalam studi ini, lokasi penelitian ditetapkan di PT. BPRS Jam Gadang Bukittinggi (Perseroda), yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 52 A, Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang. Pengumpulan data awal melalui observasi dan wawancara dilakukan pada 25 Desember 2024, sedangkan pelaksanaan penelitian utama dijadwalkan setelah seminar proposal pada semester genap tahun akademik 2024/2025, dengan keseluruhan penyusunan skripsi berlangsung sejak akhir 2024 hingga selesai.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data subjektif, yaitu data yang merefleksikan pendapat, sikap, dan pengalaman individu atau kelompok yang menjadi subjek studi. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan nasabah dan karyawan PT. BPRS Jam Gadang, sedangkan data sekunder diambil dari berbagai referensi pendukung seperti buku, laporan penelitian

sebelumnya, serta dokumen yang relevan. Informan utama dalam penelitian ini meliputi perwakilan dari pihak internal PT. BPRS Jam Gadang dan sepuluh nasabah pengguna pembiayaan Tabungan Utsman. Untuk memperoleh data yang komprehensif, peneliti menerapkan tiga teknik pengumpulan data: observasi langsung ke lokasi penelitian, wawancara tatap muka dengan informan, serta dokumentasi dari sumber-sumber tertulis seperti arsip dan literatur ilmiah (Tersiana, 2018).

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan interaktif yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi penting, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data mentah agar lebih mudah dianalisis. Tahap selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk naratif, diagram, atau hubungan antar kategori guna mempermudah penarikan makna. Tahap terakhir adalah kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti mulai merumuskan interpretasi sejak tahap awal pengumpulan data dan terus memverifikasinya seiring proses berlangsung. Ketiga tahap ini berjalan secara simultan dan memungkinkan peneliti membangun pemahaman yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap fenomena yang diteliti (Efendi & Wira, 2025).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penyampaian hasil penelitian disusun secara sistematis, dimulai dari pemaparan mengenai aspek-aspek pembiayaan seperti kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, serta balas jasa. Setelah itu, pembahasan dilanjutkan pada data terkait pendapatan pelaku UMKM yang mencakup omzet penjualan, pertumbuhan pendapatan sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan, frekuensi penerimaan pendapatan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan usaha dan rumah tangga.

1. Pembiayaan

a. Kepercayaan

Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam implementasi pembiayaan di BPRS Jam Gadang. Dalam hal ini, nasabah diberikan keyakinan penuh untuk memperoleh pembiayaan sesuai dengan skala usaha yang mereka jalankan. Para nasabah mengungkapkan bahwa mereka merasa diberi ruang untuk mengelola dana tanpa rasa curiga atau tekanan administratif yang berlebihan. Pendekatan ini selaras

dengan prinsip dasar ekonomi syariah yang menekankan kejujuran dan amanah sebagai pilar utama dalam setiap transaksi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Pak Ison, pemilik toko kelontong, bahwa kepercayaan diberikan sejak awal proses pengajuan, di mana pihak bank secara langsung melakukan survei ke tempat usaha dan memfasilitasi proses administrasi secara terbuka. Transparansi dan kemudahan yang ditawarkan membuat nasabah merasa dihargai dan didukung dalam mengembangkan usahanya. Ia menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan oleh pihak bank tidak berorientasi semata-mata pada profit, melainkan lebih pada kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.

Aspek transparansi menjadi elemen penting dari praktik pembiayaan di lembaga ini. Prosedur yang sederhana dan penjelasan biaya yang gamblang menumbuhkan rasa percaya di kalangan nasabah. Pak Ahmad, pemilik toko sembako, juga menyatakan bahwa setiap tahapan dalam proses pengajuan dilakukan secara terbuka dan komunikatif, sehingga ia merasa dilibatkan dan tidak terbebani oleh ketidakpastian. Pelayanan yang diberikan menunjukkan bahwa BPRS Jam Gadang tidak hanya menjunjung nilai syariah, tetapi juga prinsip human-centered service yang sangat jarang ditemukan di lembaga keuangan konvensional.

b. Kesepakatan

Kesepakatan dalam konteks pembiayaan di BPRS Jam Gadang diwujudkan melalui akad yang telah disetujui kedua belah pihak. Akad ini tidak hanya mencakup jumlah pokok pembiayaan dan jangka waktu, tetapi juga menyertakan syarat-syarat yang fleksibel dan responsif terhadap situasi ekonomi nasabah. Pendekatan ini memungkinkan pelaku UMKM merasa lebih nyaman dan aman dalam menjalankan usahanya tanpa khawatir akan beban administratif yang berat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Rizal Anwar, seorang pedagang es, ia merasa bahwa proses akad dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Seluruh ketentuan dijelaskan secara rinci, dan pihak bank membuka ruang diskusi untuk setiap poin yang belum dipahami oleh nasabah. Ini menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya bersifat prosedural, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen edukatif yang membangun kesadaran finansial pelaku UMKM.

Selanjutnya, kesepakatan yang adil juga mencakup fleksibilitas dalam menentukan besaran cicilan harian, yang disesuaikan dengan kapasitas usaha. Ibu Nurul, pedagang pakaian, menyatakan bahwa ketentuan yang ditetapkan oleh bank sangat rasional dan tidak membebani. Ia diberikan kesempatan untuk membaca dan memahami isi akad sebelum menandatangani, sehingga keputusannya didasarkan pada pemahaman penuh, bukan keterpaksaan. Ini memperlihatkan adanya pengakuan terhadap hak-hak nasabah sebagai mitra, bukan hanya objek pembiayaan.

Kesepakatan yang dibuat secara adil dan terbuka menjadi elemen kunci dalam menjaga kesinambungan hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah. Dalam konteks ini, BPRS Jam Gadang menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip keadilan (al-‘adl) yang menjadi inti dari transaksi muamalah dalam Islam.

c. Jangka Waktu

Jangka waktu pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Jam Gadang bersifat fleksibel, dengan maksimum durasi hingga 12 bulan. Skema ini memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk menyesuaikan kemampuan pembayaran dengan kondisi usaha yang sedang dijalankan tanpa tekanan waktu yang berlebihan.

Nasabah seperti Pak Hendra dan Ibu Tati menyampaikan bahwa sistem angsuran harian dan komunikasi aktif dengan pihak bank menjadikan proses pelunasan lebih ringan. Selain itu, tidak adanya denda untuk keterlambatan yang wajar mencerminkan komitmen lembaga terhadap prinsip keadilan dan keberpihakan pada usaha kecil.

d. Resiko

Dalam pembiayaan Ustman, pengelolaan risiko dilakukan secara preventif dengan survei usaha dan pemantauan berkala. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan risiko gagal bayar dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan usaha.

Nasabah merasa terbantu dengan pendekatan solutif dari pihak bank saat menghadapi kendala, sebagaimana pengalaman Ibu Dewi dan Pak Yanto. Tambahan modal juga berkontribusi dalam mengurangi risiko usaha, terutama terkait ketersediaan stok dan kelancaran operasional harian.

e. Balas Jasa

Balas jasa pada pembiayaan ini menggunakan skema margin nol persen, di mana seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah daerah. Nasabah hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman, tanpa dikenakan bunga atau biaya tambahan lainnya.

Sistem ini dianggap adil dan transparan oleh nasabah seperti Ibu Nurmaitis dan Pak Ison, karena mereka tidak merasa dibebani oleh biaya tersembunyi. Hal ini mencerminkan pelaksanaan prinsip maqashid syariah dan memperkuat loyalitas terhadap BPRS Jam Gadang.

Berdasarkan keenam indikator pembiayaan yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Ustman oleh BPRS Jam Gadang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas ekonomi pelaku UMKM. Pelaksanaan prinsip syariah dilakukan secara konsisten melalui kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu yang fleksibel, manajemen risiko, dan sistem balas jasa yang mendukung.

Respon positif dari informan menunjukkan bahwa program ini tidak hanya membantu pelaku usaha dari sisi finansial, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Program ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah daerah dalam memberdayakan sektor UMKM secara berkelanjutan.

2. Pendapatan

a. Omzet Penjualan

Omzet penjualan merupakan salah satu indikator utama dalam mengevaluasi efektivitas program pembiayaan terhadap kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengalami peningkatan omzet yang signifikan setelah menerima fasilitas pembiayaan dari BPRS Jam Gadang.

Ketersediaan tambahan modal memungkinkan pelaku usaha untuk menambah jumlah dan jenis barang dagangan, memperbaiki kualitas pelayanan, serta memperluas kapasitas produksi. Langkah-langkah ini berdampak positif terhadap peningkatan daya saing usaha di pasar lokal, sebagaimana tercermin dari pengalaman yang disampaikan oleh Pak Ahmad dan Pak Rizal Anwar.

b. Pertumbuhan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Pembiayaan

Selain peningkatan omzet, pertumbuhan pendapatan bersih juga menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan program pembiayaan. Setelah menerima dana pembiayaan, pelaku usaha melaporkan peningkatan signifikan dalam pendapatan bersih bulanan, yang utamanya disebabkan oleh efisiensi biaya operasional dan ketersediaan modal yang lebih stabil.

Pengalaman yang diungkapkan oleh Ibu Nurul dan Pak Hendra memperlihatkan bahwa pendapatan mereka mengalami kenaikan hampir dua kali lipat. Faktor-faktor seperti keberagaman produk yang ditawarkan, pemilihan lokasi strategis, serta peningkatan kualitas pelayanan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan pendapatan usaha secara keseluruhan.

c. Frekuensi Penerimaan Pendapatan

Frekuensi penerimaan pendapatan juga mengalami perubahan yang signifikan pasca pembiayaan. Sebelum memperoleh modal usaha, mayoritas pelaku UMKM hanya memperoleh penghasilan dalam beberapa hari tertentu dalam seminggu akibat keterbatasan modal kerja dan kapasitas produksi.

Namun, dengan adanya pembiayaan, pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas bisnis secara harian. Hal ini berdampak pada stabilitas arus kas serta memungkinkan pengaturan keuangan yang lebih sistematis dan berkelanjutan, sebagaimana dicontohkan oleh Ibu Tati dan Ibu Dewi dalam kegiatan usaha harian mereka.

d. Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Usaha dan Rumah Tangga

Program pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Jam Gadang juga meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan usaha dan rumah tangga secara bersamaan. Stabilitas pendapatan yang dihasilkan pasca pembiayaan mendukung terpenuhinya kebutuhan dasar, baik untuk kelangsungan operasional bisnis maupun kesejahteraan keluarga.

Sebagaimana disampaikan oleh Pak Yanto dan Ibu Nurmaitis, pembiayaan yang diterima mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman konsumtif, sehingga pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan usaha secara mandiri dan menjaga keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini mengindikasikan

keberhasilan implementasi prinsip pembiayaan syariah dalam mendorong kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pembahasan

Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Ustman oleh BPRS Jam Gadang berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM di Bukittinggi. Program ini tidak hanya menyediakan tambahan modal, tetapi juga membantu pelaku usaha memperluas kapasitas bisnis. Dampaknya terlihat pada peningkatan omzet, pertumbuhan pendapatan, stabilitas arus kas, dan kemampuan memenuhi kebutuhan usaha serta rumah tangga. Pendampingan berkala yang dilakukan BPRS turut berkontribusi terhadap keberhasilan ini.

Kepercayaan nasabah terbangun melalui proses pengajuan yang mudah, layanan yang ramah, serta monitoring yang mendukung. Hal ini sejalan dengan temuan Rendra Adhi S dan Munawar Ismail bahwa kepercayaan adalah kunci keberhasilan pembiayaan syariah. Nasabah merasa diperlakukan adil sesuai prinsip Islam, yang memperkuat motivasi untuk memenuhi kewajiban tanpa tekanan.

Kesepakatan dalam akad dilakukan secara transparan dan melibatkan nasabah dalam penentuan cicilan serta jangka waktu. Ini mencerminkan prinsip syariah seperti ta'awun dan syura, sebagaimana diperkuat dalam penelitian Ilyas Mudzakir. Penelitian ini menambahkan bahwa keterlibatan nasabah bersifat aktif dan partisipatif.

Jangka waktu fleksibel dan sistem setoran harian disesuaikan dengan karakter pendapatan harian UMKM. Fleksibilitas ini tidak hanya administratif, tetapi juga teknis, dan memperkuat loyalitas nasabah. Temuan ini memperluas kajian Kasmir yang menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam pembiayaan mikro.

Dalam hal manajemen risiko, pendekatan humanis melalui kunjungan berkala menunjukkan efektivitas pengawasan. Pendekatan ini membangun tanggung jawab nasabah dan mencerminkan nilai rahmah dalam Islam. Hal ini didukung oleh penelitian Mudzakir Ilyas mengenai pentingnya pengelolaan risiko.

Pembiayaan Ustman yang bebas margin meringankan beban nasabah. Seluruh biaya ditanggung pemerintah daerah, memungkinkan pelaku usaha memanfaatkan dana sepenuhnya untuk pengembangan usaha. Hal ini selaras dengan temuan Rendra Adhi S dan Munawar Ismail mengenai efektivitas margin rendah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM.

Pendapatan pelaku usaha meningkat karena tambahan modal digunakan untuk stok barang, perluasan usaha, dan peningkatan layanan. Frekuensi penerimaan pendapatan menjadi lebih stabil, mendukung pengelolaan kas harian dan kebutuhan rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Suhardianti dan Siti Khairun Nisa.

Penelitian ini memperluas temuan sebelumnya dengan menekankan bahwa peningkatan omzet dan pendapatan bersih tidak hanya karena modal, tetapi juga efisiensi biaya dan perencanaan usaha yang lebih baik. Stabilitas pemasukan memungkinkan keseimbangan antara kebutuhan usaha dan rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa program pembiayaan Utsman yang dijalankan oleh PT BPRS Jam Gadang memiliki dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bukittinggi. Temuan ini sekaligus memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitian, khususnya terkait mekanisme pembiayaan dan kontribusinya terhadap pendapatan pelaku usaha. Pembiayaan Utsman ini mengacu pada lima indikator utama, yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, pengelolaan risiko, dan balas jasa. Dalam hal kepercayaan, proses pengajuan kredit berlangsung secara mudah dan cepat, dilengkapi dengan sistem monitoring yang lebih bersifat pendampingan daripada pengawasan kaku. Sementara itu, kesepakatan antara nasabah dan pihak bank diwujudkan melalui akad yang dilakukan secara transparan dan berbasis pada prinsip syariah, mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Aspek jangka waktu pembiayaan pun disesuaikan dengan kemampuan nasabah, dengan tenor maksimal 12 bulan serta skema setoran harian yang memberi keleluasaan dalam pengelolaan arus kas. Dalam pengelolaan risiko, BPRS Jam Gadang menerapkan pendekatan persuasif berupa pendampingan rutin terhadap nasabah, bukan sekadar tindakan pengawasan yang kaku dan represif. Adapun indikator balas jasa menjadi ciri khas dari program ini, di mana margin keuntungan bagi pihak bank ditetapkan sebesar nol persen. Ini berarti seluruh biaya pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui mekanisme subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga nasabah tidak dibebani oleh biaya tambahan seperti bunga, margin, atau administrasi lainnya. Keberadaan skema ini sangat membantu pelaku UMKM yang kerap terkendala dalam mengakses pembiayaan konvensional.

Dalam aspek peningkatan pendapatan, terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur keberhasilan program. Pertama, peningkatan omzet penjualan secara umum menunjukkan tren positif, khususnya setelah memperoleh pembiayaan Utsman. Kedua, pendapatan bulanan pelaku UMKM mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan sebelum mendapatkan pembiayaan. Ketiga, penerimaan pendapatan menjadi lebih stabil dan rutin, sehingga mempermudah dalam hal pengelolaan keuangan, baik untuk kebutuhan usaha maupun rumah tangga. Keempat, kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan mendukung ekspansi usaha juga mengalami peningkatan. Dengan demikian, program pembiayaan Utsman dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi ekonomi yang efektif dalam memberdayakan pelaku usaha kecil, serta layak untuk direplikasi dan dikembangkan secara berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, R. R., Nursyamsi, I., & Syamsuddin, A. R. (2020). Effect of customer value and experiential marketing to customer loyalty with customer satisfaction as intervening variable (case study on gojek makassar consumers). *The Asian Journal of Technology Management*, 13(1), 82–97.
- Annisa, R., & Nurani, K. (2024). Analisis Pendapatan Petani Kelapa Sawit dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Nagari Bawan Kabupaten Agam. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 3(3), 45–56.
- Ayodya, R. W. (2020). *UMKM 4.0*. Elex Media Komputindo.
- Dhani, P. R., & Illahi, I. (2023). Analisis Penerapan PSAK 102: Akuntansi Murabahah: (Studi Kasus Pada BPRS Jam Gadang Bukittinggi dan BPRS Al-Makmur Payakumbuh). *JIMP: Jurnal Ilmiah Manajemen Profetik*, 1(2), 37–49.
- Efendi, E. C., & Mansur, Y. (2023). Analisis Strategi Pemasaran Produk Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas KC Padang Panjang. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 3(1), 54–66.
- Efendi, E. C., & Wira, A. (2025). Peran Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendukung Kebutuhan Perekonomian Masyarakat Indonesia. *Mbisku: Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan*, 2(1), 49–60.

-
- Efendi, E. C., & Zulvianti, N. (2025). The Role of Sharia Crowdfunding in Poverty Reduction in Indonesia. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 7(1).
- Fitri, S. A., & Nurani, K. (2023). Analisis Manajemen Pelayanan Haji Dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah Pada Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 229–238.
- Fitria, H., Kristiawan, M., & Rahmat, N. (2019). Pelatihan penelitian tindakan kelas sebagai sarana peningkatan kompetensi guru. *Abdimas Unwahas*, 4(1).
- Husaini, M., Raudah, S., & Amaliya, M. (2023). Perluasan jangkauan UMKM di Kabupaten Balangan: Sebuah implementasi program. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), 2134–2139.
- Mahmuda, R., & Nurani, K. (2024). Strategi pemasaran dan minat beli konsumen dalam sektor wisata kuliner berbasis pariwisata syariah: Studi di Los Lambuang Kurai Taji, Pariaman. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(10), 1579–1589.
- Marliza, K., & Nurani, K. (2024). Kajian strategi pengembangan destinasi wisata Puncak Kabun Palanta Inyia Reda Singgalang untuk meningkatkan jumlah pengunjung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 224–242.
- Sa'idah, A. N. (2017). Studi pengembangan pariwisata sebagai upaya peningkatan PAD Kota Bandar Lampung: Analisis pada Dinas Pariwisata setempat. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung.
- Saleh, A. R., & Utomo, H. (2018). Hubungan antara disiplin, motivasi, etos, dan lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan bagian produksi di PT Inko Java Semarang. *Among Makarti*, 11(1).
- Sari, D. P., Putri, A., & Sholihin, A. (2023). Transformasi Bank Perkreditan Rakyat menjadi syariah dan dampaknya pada kinerja keuangan: Studi pada PT BPR Jam Gadang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2591–2601.
- Sari, I. (2020). Tinjauan pustaka mengenai kecemasan masyarakat akibat pandemi COVID-19. *Bina Generasi: Jurnal Kesehatan*, 12(1), 69–76.
- Sedyastuti, K. (2018). Pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta peningkatan daya saing di pasar global. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 117–127.
- Srijani, K. N. (2020). Kontribusi UMKM dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 8(2), 191.

- Sunarsi, D. (2020). Dampak digitalisasi terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. *Digitalisasi UMKM*, 57.
- Supriani, Y., Ulfah, U., & Arifudin, O. (2020). Strategi peningkatan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, 1(1), 1–10.
- Suteja, I. G. N. (2018). Evaluasi kesehatan keuangan menggunakan metode Altman Z-Score pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk. *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 12–17.
- Tersiana, A. (2018). *Teknik dan pendekatan dalam penelitian ilmiah*. Anak Hebat Indonesia.